

TINJAUAN GEOGRAFIS WILAYAH POTENSIAL IBUKOTA NEGARA INDONESIA

GEOGRAPHIC REVIEW OF POTENTIAL AREA STATE CAPITAL OF INDONESIA

**¹Anugerah A. Sahamony, ²Luthfi Muta'ali, dan Estuning Tyas Wulan Mei³*
Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Submitted: 06-07-2018; Revised: 17-03-2019; Accepted: 17-03-2019

ABSTRACT

The number of actual problems in the existing capital of Indonesia raises the idea to move the national government center to another region. From all parts of Indonesia republic territory, which region is most potential to be the location of the nation's capital relocation? The aim of this research is to identify the most potential area to be the location of the national government center development. The method used in this research is a quantitative analysis with 'zooming' concept. The analysis process is divided into three stages with nine assessment indicators. The stages are; (1) identifying the most ideal provinces using spatial centrality, external accessibility, and the vulnerability of macro-scale natural disaster variables, (2) identifying the most potential province using the potential of social condition, the potential of infrastructure development, and the potential of national economic integration variables, and (3) determining the most suitable zone to be the location of nation's capital development, which is using variables of physiological and regulational suitability (land availability, water availability, and the vulnerability of micro-scale disaster). The results of this research indicate that Paser District in Kalimantan Timur is the most potential region to be the future nation's capital of Indonesia.

Keywords: *Capital; Land; Potential; Region; Relocation.*

ABSTRAK

Berbagai macam permasalahan aktual ibukota negara Indonesia melahirkan gagasan untuk memindahkan fungsi pusat pemerintahan nasional ke wilayah lain. Dari sekian besarnya eksistensi fisik Negara Indonesia, pada titik mana ibukota negara akan direlokasi? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang paling potensial menjadi lokasi pembangunan ibukota negara Indonesia yang baru dari kacamata keilmuan geografi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan konsep 'zooming'. Proses analisis terbagi ke dalam tiga tahapan dengan sembilan indikator sebagai timbangannya, yakni; (1) identifikasi provinsi ideal dengan menggunakan variabel sentralitas keruangan, aksesibilitas eksternal, dan kerawanan bencana skala makro, (2) penentuan provinsi potensial dengan menggunakan variabel potensi sosial, infrastruktur, dan integrasi ekonomi nasional, serta (3) analisis zona ideal pembangunan ibukota negara menggunakan variabel kelayakan fisiologi dan regulasi (ketersediaan lahan, ketersediaan air, ancaman bencana skala mikro). Hasil penelitian ini menunjukkan Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah yang paling potensial menjadi ibukota baru Negara Indonesia.

Kata Kunci: *Ibukota; Lahan; Potensi; Relokasi; Wilayah*

*Corresponding author: anugerahsahamony@gmail.com

Copyright © 2020 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Jurnal Teknosains is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada.

PENGANTAR

Ibukota negara merupakan unit fisik regional yang menjadi wadah dari segala macam aktivitas pemerintahan pada skala nasional. Selain itu, ibukota negara merupakan pusat dari seluruh komponen kegiatan penyelenggaraan negara dengan pemerintah pusat sebagai eksekutornya. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal ibukota negara.

Keoptimalan penyelenggaraan pemerintahan nasional Negara Indonesia tergantung pada kondisi serta karakteristik internal maupun eksternal Provinsi DKI Jakarta. Baiquni (2004) mengemukakan bahwa sentralitas kekuasaan di tangan pemerintah pusat menimbulkan pola tunggal, bahwa semua urusan negara pada skala nasional harus melalui dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Pola ini mendorong semua kegiatan baik ekonomi, politik, maupun pemerintahan harus diselenggarakan di pusat negara (DKI Jakarta). Segala macam fenomena sentralisasi tersebut berdampak pada aspek tekanan penduduk.

Salah satu permasalahan turunan dari tingginya tekanan penduduk di Provinsi DKI Jakarta adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas kemudian melahirkan banyak dampak negatif tidak terkecuali yang bersinggungan dengan aktivitas pemerintahan. Selain kemacetan lalu lintas, permasalahan yang lebih elementer akibat tekanan penduduk yang besar adalah kualitas lingkungan hidup yang memburuk. Permukiman kumuh dan liar, persoalan sampah dan limbah yang tidak terkelola dengan baik, polusi kendaraan dan industri yang berada pada kadar "di atas normal" merupakan wajah dan kondisi aktual kawasan perkotaan Provinsi DKI Jakarta sebagai hasil dari ledakan populasi yang tidak terkendali. Kondisi tersebut diperburuk oleh ancaman bencana banjir yang nyaris menjadi "agenda rutin" di Provinsi DKI Jakarta.

Selain karakteristik dari sisi internal tersebut, permasalahan eksternal yang menjadi perhatian dari Provinsi DKI Jakarta adalah letaknya secara geografis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi Provinsi DKI Jakarta dinilai

tidak ideal dan strategis untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang mengedepankan asas keadilan. Provinsi DKI Jakarta yang terletak di bagian barat Indonesia akan melahirkan situasi yang relatif menyulitkan daerah-daerah di bagian timur Indonesia.

Berdasarkan penjabaran kondisi aktual ibukota negara di atas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI Jakarta saat ini berada pada kategori "tidak kondusif" dalam upaya perwujudan pemerintahan dan pelayanan nasional yang optimal. Wacana rasional yang kemudian muncul sebagai solusi untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang optimal adalah pemindahan ibukota negara. Selain dalam rangka melahirkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien, ide pemindahan ibukota negara juga dinilai dapat "menyelamatkan" Kota Jakarta dari kondisi lingkungan dan demografis yang berpotensi menjadi semakin buruk.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis lokasi (wilayah) yang paling potensial sebagai tempat dibangunnya komponen pusat pemerintahan nasional atau ibukota negara Indonesia yang baru. Identifikasi dan analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pertimbangan keilmuan geografi yang komprehensif yakni dengan menggunakan pendekatan geografis (spasial, ekologis, dan kompleks kewilayahan).

Spate (1942) mendefinisikan ibukota sebagai tempat dimana kekuasaan politik terkonsentrasi. Dijkink (2000) mendefinisikan ibukota sebagai sebuah pusat dari berdirinya wilayah yang akan menjadi pusat individu dalam ruang perkotaan dan memiliki fungsi pemerintahan, sosial, dan dianggap pula sebagai sebuah simbol lingkungan wilayah utama. Hal serupa dinyatakan oleh Claval (2000) yang mengungkapkan bahwa fungsi-fungsi yang berada dalam sebuah ibukota mencakup fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi pemerintahan.

Pusat pemerintahan merupakan salah satu fungsi wilayah yang terdapat pada sebuah ibukota. Pusat pemerintahan didefinisikan

sebagai sebuah fungsi dalam wilayah, bukan sebagai teritorial yang bersifat tetap secara yuridis (Aurumbita, 2015). Ruang lingkup pemerintahan dari suatu ibukota didasarkan pada posisi wilayah ibukota tersebut berada secara struktural. Ibukota kabupaten sebagai pusat pemerintahan daerah tingkat II (lokal), ibukota provinsi sebagai pusat pemerintahan daerah tingkat I (regional), dan ibukota negara sebagai pusat pemerintahan negara (nasional). Penelitian ini akan mengedepankan fungsi pemerintahan dari sebuah ibukota, sehingga penggunaan istilah “ibukota” selanjutnya dapat dipahami sebagai “pusat pemerintahan” dan begitu pula sebaliknya.

Pemindahan Lokasi Pusat Pemerintahan (Ibukota) merupakan upaya merelokasi atau menciptakan ruang dan wilayah baru sebagai lokasi berdirinya komponen-komponen pusat pemerintahan untuk menggantikan ruang dan wilayah sebelumnya. Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan dari suatu wilayah ke wilayah lain menjadi sebuah keputusan yang besar, karena membutuhkan kesiapan institusi, masyarakat, dan dana yang cukup banyak (Aurumbita, 2015).

Alternatif pemindahan pusat pemerintahan tidak hanya dapat menciptakan optimalisasi pelayanan dan kinerja pemerintah, tetapi kebijakan ini dapat menjadi strategi dan awal kemunculan kota baru (*new town*) di daerah tujuan. Permasalahan kota seperti ukuran kota yang tidak seimbang dengan pertumbuhan populasinya, ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur populasi dan perkembangan kota yang menyebabkan kemacetan, polusi, kriminalitas, serta banyaknya migrasi dari kota menuju pinggiran kota nyatanya memicu untuk membuat alternatif pengembangan kota baru (Golany, 1976).

Pembangunan ibukota atau pusat pemerintahan yang baru dalam implementasinya merupakan upaya pembangunan kota baru. Golany (1976) menyatakan bahwa ada lima kriteria dalam menentukan lokasi sebuah kota baru, yakni (1) kriteria fisik, (2) kriteria sosial dan ekonomi, (3) kriteria potensi sumberdaya lokal, (4) kriteria lingkungan, dan (5) kriteria politik.

Ali (2010) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pusat pemerintahan, yakni; (1) letak geografis yang strategis dan berada pada dataran rendah (<3%), (2) ketersediaan lahan yang cukup, (3) penggunaan lahan yang bukan lahan pertanian, (4) status lahan, (5) bukan daerah rawan bencana, (6) ketersediaan sumberdaya air yang memadai, (7) aksesibilitas yang baik, (8) jumlah penduduk, (9) kepadatan penduduk, (10) heterogenitas masyarakat (ekonomi, agama, etnis), dan (11) ketersediaan fasilitas ekonomi dan sosial (rumah sakit, air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik).

Aurumbita (2015) menyatakan bahwa di dalam upaya penentuan lokasi ibukota sebagai pusat pemerintahan baru harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain letak geografis, kondisi fisik, aksesibilitas, kependudukan, ketersediaan fasilitas, kebijakan, politik, dan nilai historis. Berdasarkan berbagai teori terkait faktor penentu lokasi ibukota tersebut, disimpulkan bahwa secara geografis, indikator yang digunakan sebagai faktor penentu lokasi (wilayah) ibukota negara yang baru pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Indikator Penentuan Lokasi Ibukota (Pusat Pemerintahan) Negara

Indikator	Variabel
Kestrategisan	- Sentralitas
Keruangan	- Aksesibilitas
Kondisi Fisik	- Ancaman Bencana - Ketersediaan Lahan - Ketersediaan Air
Kelengkapan Infrastruktur	- Potensi Pembangunan Infrastruktur - Ketersediaan Aktual Infrastruktur
Kependudukan	- Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia - Potensi Konflik - Stabilitas Politik
Ekonomi	- Potensi Integrasi Ekonomi

Sumber: Olah data penulis

Secara umum, tulisan ini menggunakan sembilan teknis analisis untuk mengidentifikasi

nilai dan karakteristik potensial dari setiap indikator. Teknik-teknik analisis tersebut antara lain: (1) Analisis Kestrategisan Geografis menggunakan data titik koordinat dari seluruh wilayah (dalam skala administratif provinsi) di Indonesia sebagai variabel. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kestrategisan wilayah-wilayah di Indonesia secara keruangan. (2) Analisis Aksesibilitas Eksternal dilakukan dengan mengakumulasi nilai dari berbagai komponen aksesibilitas yang dalam penelitian ini adalah jarak, waktu tempuh, dan biaya perjalanan antar wilayah. Analisis aksesibilitas eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi efisiensi aksesibilitas suatu wilayah terhadap wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. (3) Analisis Kebencanaan merupakan zonasi wilayah berdasarkan potensi ancaman bencana alam yang dimiliki. Jenis ancaman bencana yang menjadi variabel analisis adalah gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. (4) Analisis Ketersediaan Lahan dilakukan dengan mengidentifikasi lahan yang secara teoritis layak atau sesuai untuk menjadi media pembangunan ibukota (pusat pemerintahan) negara. Parameter yang digunakan sebagai indikator penilaian kesesuaian lahan dibatasi pada tiga variabel umum, antara lain: (a) kerawanan bencana alam, (b) kemiringan lereng, dan (c) regulasi/kebijakan dalam hal ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (5) Analisis Ketersediaan Air dilakukan dengan menggunakan indikator ketersediaan air meteorologis yakni curah hujan. Metode yang digunakan untuk merepresentasikan data curah hujan secara spasial adalah dengan interpolasi data curah hujan Isohyet. Isohyet adalah sebuah garis yang digambar pada peta untuk menghubungkan titik-titik yang memiliki curah hujan yang sama pada waktu tertentu. (6) Analisis Potensi Sosial dilakukan secara kuantitatif dengan perhitungan indeks komposit sebagai akumulasi dari hasil standarisasi nilai-nilai indikator potensi sosial. Indikator potensi sosial terdiri dari lima variabel yang direpresentasikan dalam bentuk indeks. Variabel-variabel tersebut mewakili tiga elemen sosial yakni sumberdaya manusia yang direpresentasikan oleh Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), stabilitas politik yang direpresentasikan oleh Indeks Demokrasi Indonesia (ID), serta potensi konflik yang direpresentasikan oleh Indeks Kerentanan Sosial yang merupakan akumulasi dari Indeks Kepuasan terhadap Keamanan, Indeks Kepuasan terhadap Hubungan Sosial, dan Indeks Keanekaragaman (Diversitas) Agama. (7) Analisis Kelengkapan Infrastruktur terbagi ke dalam dua kategori kelengkapan infrastruktur dengan variabel, unit, dan teknik analisis yang berbeda. Analisis kelengkapan infrastruktur aktual dilakukan dengan menginventarisasi sarana prasarana serta fasilitas pelayanan yang telah ada pada suatu wilayah. Analisis kelengkapan infrastruktur potensial dilakukan dengan menganalisis potensi pembangunan infrastruktur berdasarkan kondisi fisik suatu wilayah. (8) Analisis Potensi Integrasi Ekonomi dilakukan secara kualitatif dengan melihat posisi dan situasi suatu wilayah terhadap komponen-komponen aktivitas ekonomi secara spasial dan statistik. Komponen-komponen yang dimaksud meliputi letak kawasan-kawasan ekonomi strategis, pusat-pusat produksi dan industri potensial, jaring-jaring distribusi atau jalur perdagangan internasional, pasar-pasar potensial, pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan, serta berbagai macam komponen aktivitas perekonomian regional makro lainnya. (9) Penyusunan Indeks Komposit merupakan adopsi dari teknik analisis tingkat perkembangan wilayah oleh Muta'ali (2015) yang menggunakan metode tersebut sebagai teknik akumulasi nilai-nilai dari indikator yang ada. Sebelum dilakukan penjumlahan, indikator-indikator tersebut harus distandarisasi terlebih dahulu sehingga memiliki satuan yang sama. Teknik standarisasi yang digunakan untuk menyamakan satuan indikator adalah teknik z-score. Berikut formulasi matematik teknik z-score (Muta'ali, 2015):

$$\text{Zscore} = (X - r) / Sd$$

Keterangan:

Zscore : nilai z-score

X : data indikator suatu wilayah

R : rata-rata data pengamatan

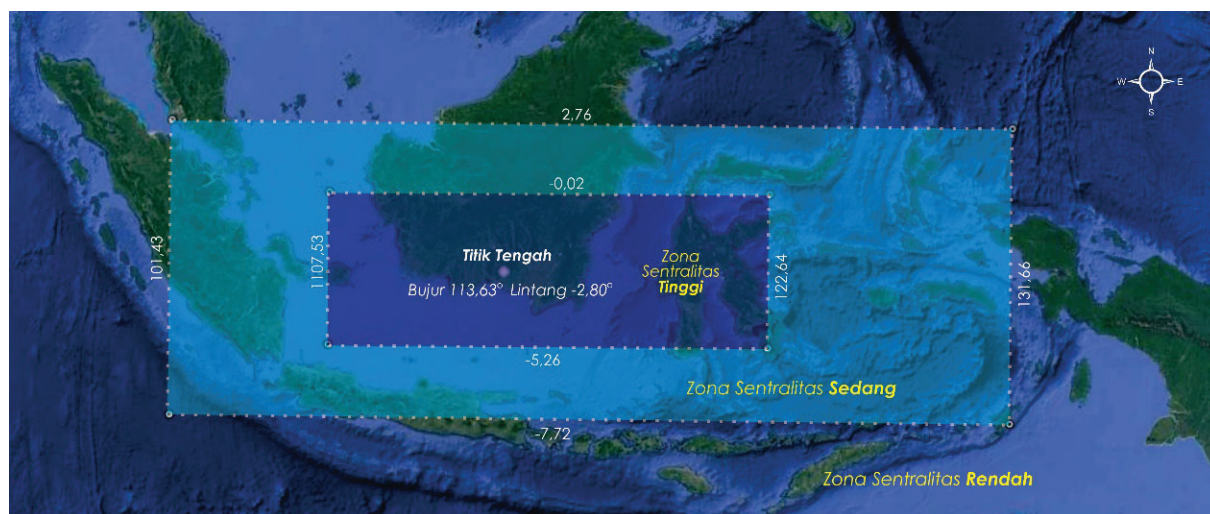
Sd : standar deviasi

HASIL DAN PEMBAHASAN Kestrategisan Geografis

Sentralitas Keruangan

Hasil analisis titik tengah (*median center analysis*) dengan menggunakan koordinat atau letak astronomis seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa titik dengan sentralitas

keruangan tertinggi di Indonesia adalah titik dengan koordinat '113°37'48" Bujur Timur dan 2°47'60" Lintang Selatan' atau dalam satuan derajat desimal yakni '113,63 (Bujur/Sumbu X) dan -2,80 (Lintang/Sumbu Y)'. Gambar 1 menampilkan representasi spasial klasifikasi sentralitas keruangan wilayah-wilayah di Indonesia.



Gambar 1.
Zonasi Sentralitas Keruangan di Indonesia

Jika klasifikasi sentralitas keruangan tersebut diterjemahkan ke dalam satuan administratif regional, maka Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara adalah delapan provinsi yang memiliki sentralitas keruangan tertinggi yakni berada pada zona 'titik tengah'. Dalam perspektif keruangan, provinsi-provinsi tersebut diindikasikan mampu menjalankan peran pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan kepada wilayah lain dengan paling efisien dan merata dibanding provinsi-provinsi yang lain (Kumar, 2015).

Aksesibilitas Eksternal

Tingkat aksesibilitas eksternal direpresentasikan oleh indeks aksesibilitas yang merupakan akumulasi dari nilai variabel-variabel aksesibilitas (jarak (*direct distance*), waktu, dan biaya). Tabel 2 menampilkan

tingkat aksesibilitas eksternal seluruh provinsi di Indonesia.

Tabel 2.
Aksesibilitas Eksternal Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Indeks Aksesibilitas	Tingkat Aksesibilitas
1.	Aceh	-39,96	Rendah
2.	Sumatera Utara	-23,30	Rendah
3.	Sumatera Barat	-11,37	Sedang
4.	Riau	-13,39	Sedang
5.	Kepulauan Riau	-0,52	Sedang
6.	Jambi	-3,65	Sedang
7.	Sumatera Selatan	0,34	Sedang
8.	Bangka Belitung	5,98	Sedang
9.	Bengkulu	-4,47	Sedang
10.	Lampung	9,77	Sedang

ANUGERAH A. SAHAMONY, LUTHFI MUTA'ALI, DAN ESTUNING TYAS WULAN MEI ❖
TINJAUAN GEOGRAFIS WILAYAH POTENSIAL IBUKOTA NEGARA INDONESIA

No.	Provinsi	Indeks Aksesibilitas	Tingkat Aksesibilitas
11.	DKI Jakarta	12,30	<i>Sedang</i>
12.	Jawa Barat	9,39	<i>Sedang</i>
13.	Banten	10,85	<i>Sedang</i>
14.	Jawa Tengah	16,46	<i>Sedang</i>
15.	DI Yogya-karta	10,65	<i>Sedang</i>
16.	Jawa Timur	18,03	<i>Tinggi</i>
17.	Kalimantan Barat	20,05	<i>Tinggi</i>
18.	Kalimantan Tengah	17,15	<i>Tinggi</i>
19.	Kalimantan Selatan	18,24	<i>Tinggi</i>
20.	Kalimantan Timur	19,55	<i>Tinggi</i>
21.	Kalimantan Utara	-0,82	<i>Sedang</i>
22.	Sulawesi Utara	-6,57	<i>Sedang</i>
23.	Gorontalo	-0,27	<i>Sedang</i>
24.	Sulawesi Tengah	9,70	<i>Sedang</i>
25.	Sulawesi Selatan	13,50	<i>Sedang</i>
26.	Sulawesi Barat	4,59	<i>Sedang</i>
27.	Sulawesi Tenggara	-4,06	<i>Sedang</i>
28.	Bali	8,97	<i>Sedang</i>
29.	Nusa Tenggara Barat	8,64	<i>Sedang</i>
30.	Nusa Tenggara Timur	-0,26	<i>Sedang</i>
31.	Maluku	-12,74	<i>Sedang</i>
32.	Maluku Utara	-7,86	<i>Sedang</i>
33.	Papua Barat	-31,63	<i>Rendah</i>
34.	Papua	-53,32	<i>Rendah</i>

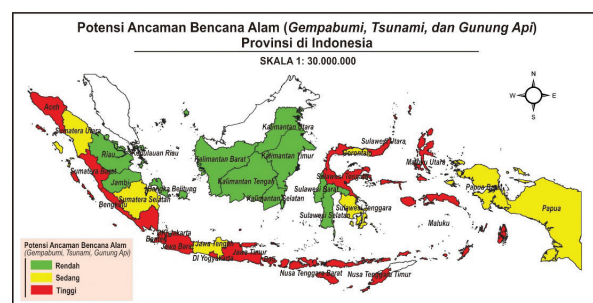
Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat lima provinsi yang memiliki aksesibilitas yang terkategori tinggi yakni Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kelima provinsi tersebut memiliki potensi keterjangkauan terbaik dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Potensi keterjangkauan yang dimaksud adalah pemerataan aksesibilitas dari dan ke seluruh provinsi lain di Indonesia.

Dengan meletakkan ibukota atau pusat pemerintahan negara pada provinsi-provinsi tersebut, aktivitas pelayanan pemerintahan dalam skala nasional dapat berjalan secara adil dan optimal.

Integrasi kelas dari kedua variabel kestrategisan geografis di atas (sentralitas keruangan dan aksesibilitas eksternal) menghadirkan empat provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Timur sebagai wilayah dengan kestrategisan geografis tertinggi.

Potensi Ancaman Bencana Skala Makro (Gempabumi, Gunung Api, Tsunami)

Untuk analisis secara makro dengan unit analisis provinsi, dipilih tiga macam ancaman bencana alam yang dijadikan sebagai pertimbangan kelayakan ibukota negara, yakni Gempabumi, Tsunami, dan Gunung Api. Data yang digunakan sebagai acuan adalah Peta Indeks Ancaman Bencana (Gempabumi, Tsunami, dan Gunung Api) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Klasifikasi wilayah berdasarkan potensi ancaman bencana alamnya dapat dilihat secara spasial representatif pada Gambar 2.



Gambar 2.
Potensi Ancaman Bencana Alam (Gempabumi, Tsunami, dan Gunung Api) Provinsi di Indonesia

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa terdapat 12 provinsi yang dinyatakan memiliki potensi ancaman bencana alam yang rendah dan bahkan pada beberapa wilayah tidak

memiliki potensi ancaman bencana alam (gempabumi, tsunami, dan gunung api) sama sekali. Provinsi tersebut adalah Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sementara provinsi-provinsi yang lain memiliki potensi ancaman bencana alam relatif lebih tinggi sehingga tergolong sebagai wilayah yang dinyatakan tidak layak menjadi lokasi ibukota atau pusat pemerintahan negara.

Provinsi Potensial Ibukota Negara

Provinsi yang dinyatakan potensial sebagai ibukota negara adalah provinsi yang memenuhi segala kriteria kelayakan ibukota negara dari kacamata geostrategis yang dituangkan ke dalam indikator-indikator situasional. Tabel 3 menampilkan matrik integrasi kelas kestrategisan geografis dan kelas potensi ancaman bencana alam yang menghasilkan klasifikasi potensi ibukota negara dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.

Tabel 3.
Matrik Potensi Ibukota Negara berdasarkan Provinsi di Indonesia

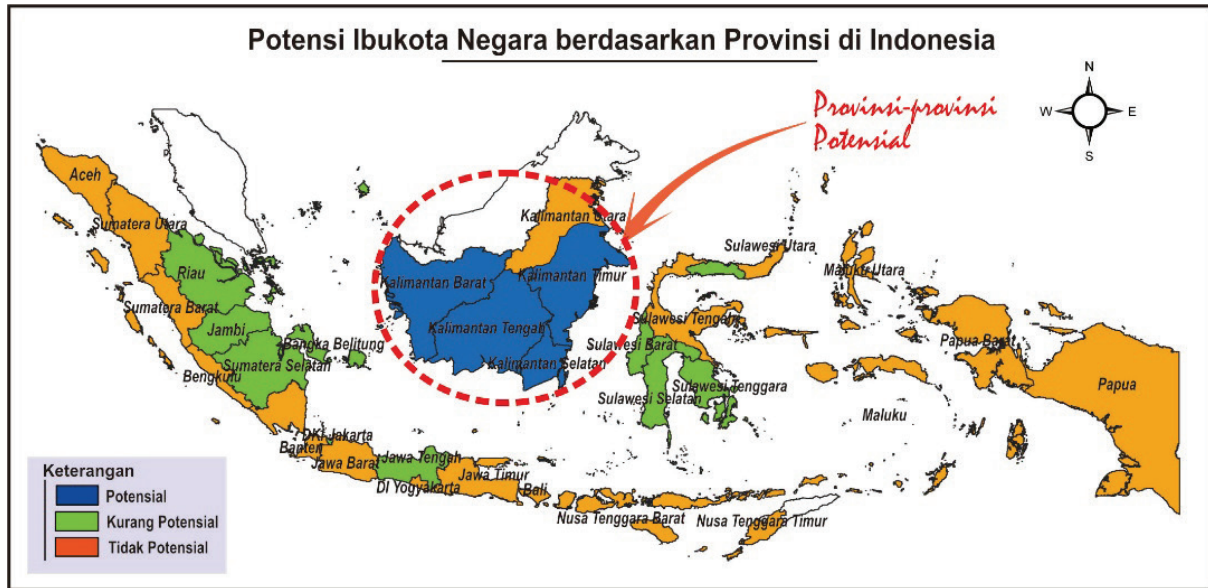
Potensi Ibukota Negara <i>Rendah</i>		Ancaman Bencana Alam		
		<i>Sedang</i>	<i>Tinggi</i>	
Kestrategisan Geografis	<i>Tinggi</i>	- Kalimantan Barat - Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur		Kalimantan Selatan
	<i>Sedang</i>	- Riau - Kepulauan Riau - Jambi - Bangka Belitung - DKI Jakarta - Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat	- Sumatera Selatan - Jawa Tengah - Gorontalo - Sulawesi Tenggara	- Bengkulu - Lampung - Jawa Barat - Banten - DI Yogyakarta - Jawa Timur - Sulawesi Utara - Sulawesi Tengah - Maluku Utara
	<i>Rendah</i>		- Sumatera Utara - Papua - Papua Barat	- Aceh - Sumatera Barat - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur

Keterangan:

	Potensial		Kurang Potensial		Tidak Potensial
---	-----------	---	------------------	---	-----------------

Mengacu kepada Tabel 3, Provinsi-provinsi yang dinyatakan sebagai wilayah yang paling ideal atau potensial menjadi ibukota negara atau pusat pemerintahan nasional yang baru berdasarkan indikator situasional

geostrategis dan potensi ancaman bencana alam skala makro (gempabumi, tsunami, dan gunung api) adalah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.



Gambar 3.
 Potensi Ibukota Negara berdasarkan Provinsi di Indonesia

Potensi Infrastruktur

Analisis potensi infrastruktur menghasilkan indeks kelengkapan infrastruktur aktual yang merupakan representasi dari tingkat ketersediaan infrastruktur penunjang fungsional ibukota negara. Berikut (Tabel 4) besaran indeks kelengkapan infrastruktur aktual dari provinsi-provinsi potensial ibukota negara.

Tabel 4.
 Indeks Kelengkapan Infrastruktur Aktual
 Provinsi Potensial Ibukota Negara

Provinsi	Indeks Kelengkapan Infrastruktur Aktual	Keterangan
Kalimantan Barat	-1,76	Rendah
Kalimantan Tengah	1,00	Tinggi
Kalimantan Selatan	0,75	Tinggi
Kalimantan Timur	0,01	Sedang

Berdasarkan Tabel 4, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan tingkat ketersediaan infrastruktur aktual penunjang fungsional ibukota negara yang relatif lebih memadai

dibanding dua provinsi lainnya. Provinsi Kalimantan Barat adalah provinsi dengan tingkat ketersediaan infrastruktur aktual terendah, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur berada pada kategori moderat (sedang).

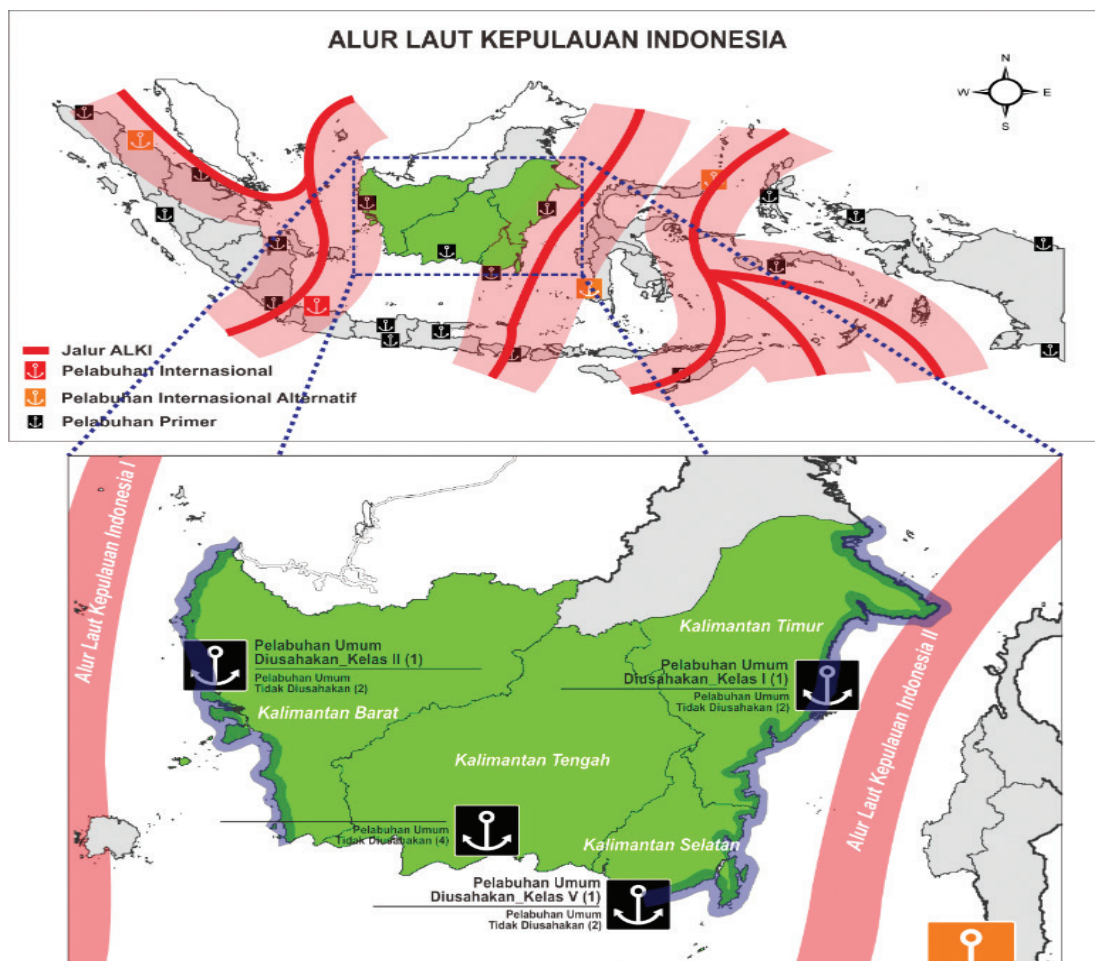
Implikasi Tutupan Lahan Gambut

Permasalahan serius terkait potensi pembangunan infrastruktur di Pulau Kalimantan adalah tipe tutupan lahan yang didominasi oleh tanah gambut. Di Pulau Kalimantan terdapat lahan gambut dengan komposisi luasan yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan masing-masing persentase luasan 19%, 28%, dan 26% dari total luas wilayah provinsi. Hal tersebut berdampak pada keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Pola sebaran lahan gambut yang memanjang di tepi (sisi) daratan juga berdampak buruk bagi potensi aksesibilitas wilayah. Provinsi Kalimantan Timur adalah satu-satunya provinsi yang tidak memiliki permasalahan serius terkait tutupan lahan gambut ini (dengan luasan lahan gambut yang hanya 4% dari luas wilayah provinsi).

Potensi Integrasi Ekonomi Nasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

ALKI sebagai jalur pelayaran internasional juga memiliki fungsi primer sebagai jalur perdagangan internasional karena memegang peran utama dalam hal distribusi komoditas atau produk-produk global. Fungsi tersebut memicu bangkitan aktivitas perekonomian terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki 'kontak langsung' dengan jalur tersebut. Wilayah-wilayah yang dilewati oleh jalur

pelayaran internasional akan menjadi jendela pasar Indonesia dengan dunia internasional. Ibu kota negara yang memiliki potensi menjadi pusat dari geliat perekonomian nasional akan memiliki keuntungan untuk memobilisasi komoditi dengan 'benefit cost ratio' yang minimum jika berada pada wilayah yang memiliki *direct access* dengan ALKI. Gambar 4 menunjukkan posisi provinsi potensial ibu kota negara yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur terhadap ALKI.



Gambar 4.
Posisi Provinsi Potensial Ibu kota Negara terhadap ALKI

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan wilayah laut yang dilewati oleh ALKI. Kondisi tersebut memungkinkan ke-tiga provinsi yang ada untuk melakukan

kontak langsung dengan jalur pelayaran internasional. Kontak langsung tersebut dapat dipicu dengan tersedianya terminal transportasi laut (pelabuhan) dengan kualitas pelayanan yang memadai. Sehingga kelayakan

fungsional pelabuhan laut yang dimiliki oleh setiap provinsi merupakan elemen lain yang perlu diperhatikan untuk melihat potensi integrasi ekonomi nasional selain posisi geografis wilayah provinsi tersebut terhadap ALKI.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki tiga pelabuhan dimana satu di antaranya merupakan 'Pelabuhan yang Diusahakan' dengan kategori pelayanan kelas I. Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki tiga pelabuhan dimana satu di antaranya merupakan Pelabuhan yang Diusahakan dengan kategori pelayanan kelas II. Sama halnya dengan kedua provinsi tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki tiga pelabuhan yang satu di antaranya merupakan Pelabuhan yang Diusahakan dengan kategori pelayanan paling minim yakni kelas V. Berdasarkan posisi geografis terhadap ALKI dan kualitas pelabuhan yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling potensial mewujudkan *direct access* yang optimal dengan aktivitas pelayaran di jalur ALKI. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi secara geografis sehingga dapat

dioptimalkan dengan penyediaan infrastruktur pelabuhan yang memadai. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berada pada kondisi paling tidak ideal berdasarkan posisi geografis terhadap jalur ALKI dan kualitas pelabuhan yang dimiliki. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki empat pelabuhan tanpa ada satupun pelabuhan dengan kategori Pelabuhan yang Diusahakan.

Konektivitas Pusat-pusat Distribusi Regional

Potensi integrasi ekonomi nasional diukur berdasarkan konektivitas wilayah tersebut dengan pusat-pusat distribusi wilayah yang lain di Indonesia. Analisis konektivitas pusat-pusat distribusi regional dilakukan dengan mengadopsi metode analisis konektivitas atau potensi keterjangkauan dalam analisis struktur ruang wilayah yakni perhitungan nilai 'konig' dan 'shimbel'. Tabel 5 menampilkan besaran konektivitas atau potensi keterjangkauan wilayah potensial ibukota negara (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur) dalam bentuk nilai konig dan nilai shimbel.

Tabel 5.
 Konektivitas Distributif Wilayah Potensial Ibukota Negara

Provinsi	Potensi Keterjangkauan (Konektivitas)		Keterangan
	Nilai Konig	Nilai Shimbel	
Kalimantan Barat	6	98	<i>Tinggi</i>
Kalimantan Tengah	7	120	<i>Rendah</i>
Kalimantan Selatan	7	108	<i>Sedang</i>
Kalimantan Timur	7	120	<i>Rendah</i>

Dari hasil perhitungan nilai konig dan shimbel, diperoleh bahwa Kalimantan Barat adalah provinsi yang memiliki potensi integrasi ekonomi nasional terbaik berdasarkan konektivitas jaringan dan pusat-pusat distribusi di Indonesia.

Potensi Sosial

Potensi sosial suatu wilayah untuk menjadi ibukota negara dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu sumberdaya manusia, stabilitas

politik, dan kerentanan sosial. Evaluasi potensi sumberdaya manusia didasarkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator yang dinilai paling representatif dan komprehensif menggambarkan hirarkis general sumberdaya manusia dari berbagai wilayah. Stabilitas politik direpresentasikan oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Kerentanan sosial diukur berdasarkan nilai dari tiga variabel relevan yakni, Indeks Kepuasan Keamanan, Indeks Kepuasan terhadap

Hubungan Sosial, serta Indeks Diversitas (Keanekaragaman) Agama. Akumulasi dari nilai ke-lima indikator yang mewakili tiga aspek potensi sosial tersebut melahirkan indeks komposit yang menggambarkan potensi sosial suatu wilayah untuk menjadi ibukota negara. Tabel 6 menampilkan indeks potensi sosial ibukota negara di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Tabel 6.
Indeks Potensi Sosial Provinsi Potensial Ibukota Negara

Provinsi	Indeks Potensi Sosial Ibukota Negara	Keterangan
Kalimantan Barat	-1,10	Rendah
Kalimantan Tengah	1,30	Tinggi
Kalimantan Selatan	-0,72	Rendah
Kalimantan Timur	0,52	Sedang

Berdasarkan hasil perhitungan indeks potensi sosial ibukota negara yang ditampilkan pada Tabel 6, terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi

dengan indeks potensi sosial tertinggi. Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan indeks potensi sosial terendah. Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai indeks potensi sosial yang berada pada kategori sedang. Secara parsial, terbukti adanya korelasi antara nilai indikator yang bersifat asuntif tersebut dengan data empiris atau realita lapangan. Sebagai contoh, Kalimantan Barat dengan Indeks Kerentanan Sosial terbesar merupakan provinsi yang memiliki catatan kasus konflik antar etnis dengan frekuensi kejadian tertinggi di Indonesia yakni rata-rata satu kasus setiap empat tahun (Bahari, 2005 dalam Arkanuddin, 2005).

Provinsi Potensial Ibukota Negara Indonesia

Hasil akumulatif dari komparasi hierarkis kondisi wilayah provinsi potensial ibukota negara berdasarkan indikator potensi infrastruktur, potensi integrasi ekonomi nasional, dan potensi sosial mencuatkan provinsi dengan keunggulan relatif dibanding provinsi potensial ibukota negara lainnya.

Tabel 7.
Hasil Analisis Identifikasi Provinsi Ideal Ibukota Negara berdasarkan Potensi Infrastruktur, Integrasi Ekonomi Nasional, dan Sosial

Provinsi	Potensi Infrastruktur		Potensi Integrasi Ekonomi Nasional		Potensi Sosial
	Aktual	Potensial	Internasional	Regional	
Kalimantan Barat	<i>Rendah</i>	<i>Rendah</i>	<i>Tinggi</i>	<i>Tinggi</i>	<i>Rendah</i>
Kalimantan Tengah	<i>Tinggi</i>	<i>Rendah</i>	<i>Rendah</i>	<i>Rendah</i>	<i>Tinggi</i>
Kalimantan Selatan	<i>Tinggi</i>	<i>Sedang</i>	<i>Sedang</i>	<i>Sedang</i>	<i>Rendah</i>
Kalimantan Timur	<i>Sedang</i>	<i>Tinggi</i>	<i>Tinggi</i>	<i>Rendah</i>	<i>Sedang</i>

Berdasarkan Tabel 7, Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan sebagai daerah yang paling ideal mengemban peran sebagai pusat pemerintahan nasional atau ibukota negara.

Ketersediaan Ruang untuk Pembangunan Ibukota Negara

Ketersediaan ruang merupakan luasan dan distribusi lahan yang dinyatakan memenuhi kriteria atau sesuai untuk menjadi lokasi pembangunan komponen pemerintahan

sebagai perwujudan fisik ibukota negara. Lahan yang memenuhi kriteria atau layak menjadi lokasi pembangunan ibukota negara adalah lahan yang tidak memiliki kendala untuk aktivitas pembangunan tersebut. Kendala yang dimaksud baik berupa karakteristik fisik alamiah yang tidak mendukung aktivitas pembangunan maupun regulasi seperti peruntukan kawasan untuk fungsi dan kebutuhan tertentu selain aktivitas pembangunan.

ANUGERAH A. SAHAMONY, LUTHFI MUTA'ALI, DAN ESTUNING TYAS WULAN MEI ❖
TINJAUAN GEOGRAFIS WILAYAH POTENSIAL IBUKOTA NEGARA INDONESIA

Lahan yang dinyatakan sesuai untuk aktivitas pembangunan komponen pusat pemerintahan merupakan bagian wilayah hasil eliminasi lahan kendala. Seperti yang dijabarkan pada poin sebelumnya, lahan kendala tersebut antara lain: (1) lahan dengan kemiringan lereng di atas 15%; (2) area yang dinilai memiliki potensi ancaman bencana alam (tanah longsor dan banjir) yang tinggi; (3) kawasan lindung (kawasan hutan lindung,

kawasan suaka alam, dan padang lamun/kawasan konservasi laut); (4) kawasan lindung geologis; serta (5) kawasan yang diperuntukkan untuk aktivitas pertambangan.

Gambar 5 merupakan Peta Ketersediaan Ruang untuk Aktivitas Pembangunan Ibukota Negara yang merupakan hasil tumpangtindih data spasial indikator-indikator penentu kesesuaian lahan. Lahan yang dinyatakan 'sesuai' merupakan lahan yang bebas dari unsur-unsur kendala di atas.



Gambar 5.
Ketersediaan Ruang untuk Pembangunan Ibukota Negara
di Provinsi Kalimantan Timur

Pada Peta Ketersediaan Ruang (Gambar 5) terlihat bahwa tidak begitu banyak ruang yang masih tersedia untuk aktivitas pembangunan ibukota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa kabupaten/kota bahkan tidak memiliki sama sekali lahan yang dinyatakan

sesuai atau memadai untuk aktivitas pembangunan ibukota negara. Wilayah dari tiga kota yakni Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang serta satu kabupaten yakni Kabupaten Mahakam Hulu dinyatakan tidak lagi memiliki zona yang layak untuk

pembangunan ibukota negara. Keseluruhan wilayah telah tertutupi oleh lahan kendala. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, serta Penajam Pasir Utara merupakan lahan kendala. Lahan yang dinyatakan sesuai untuk aktivitas pembangunan ibukota negara tidak lebih dari separuh wilayah kabupaten-kabupaten tersebut. Kabupaten Paser memiliki proporsi ketersediaan ruang terbesar namun tetap berada pada kategori minimum yakni sekitar 50% dari luas wilayah kabupaten.

Zona Ideal Pembangunan Ibukota Negara

Pemilihan lahan untuk kebutuhan pembangunan ibukota negara mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan potensi ekspansi, sehingga area-area yang cenderung melebur atau terdistribusi secara terpecah merupakan area-area yang dianggap tidak rekomendatif sebagai zona pembangunan ibukota negara. Proses zonasi tersebut menghasilkan delapan zona lahan yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8. Representasi Spasial Zona-zona lahan dapat dilihat pada Gambar 6.

Tabel 8.
Luas Lahan, Curah Hujan, dan Kepadatan Hotspot Zona Lahan Potensial Pembangunan Ibukota Negara di Provinsi Kalimantan Timur

Zona Lahan	Luas Lahan (ha)	Curah Hujan (mm/thn)	Kepadatan <i>Hotspot</i> (titik/ha)
Berau 1	205819,15	2740,41	0,000072
Berau 2	255136,64	1763,57	0,000247
Kutai Barat	187589,74	2541,25	0,001103
Kutai Kartanegara 1	270494,15	2579,57	0,002259
Kutai Kartanegara 2	103960,11	1750,00	0,000375
Kutai Timur 1	199980,29	1750,00	0,000925
Kutai Timur 2	293752,24	2277,56	0,002757
Paser	527243,04	2583,01	0,000383

Zona-zona lahan tersebut merupakan zona-zona alternatif pembangunan ibukota negara. Variabel luasan, curah hujan sebagai representasi ketersediaan air, serta kepadatan *hotspot* sebagai indikasi potensi kebakaran hutan merupakan komponen-komponen yang digunakan sebagai timbangan di dalam pemilihan zona pembangunan ibukota yang paling potensial.

Komparasi zona lahan dilakukan dengan menggunakan dua skenario. Skenario pertama adalah berdasarkan pertimbangan batasan administrasi kabupaten (tetap delapan zona). Skenario kedua berdasarkan konsentrasi agregat lahan dengan menggabungkan zona Kutai Timur 1, Kutai Kartanegara 1, dan Kutai Barat sehingga menghasilkan lima zona sebagai unit penilaian. Tabel 9 dan 10 menampilkan Indeks Kelayakan Ibukota Negara sebagai

hasil akumulasi nilai dari seluruh indikator timbangan (luas lahan, curah hujan, dan kepadatan *hotspot*) pada masing-masing skenario komparasi.

Tabel 9.
Indeks Kelayakan Ibukota Negara berdasarkan Zona Lahan (*Skenario 1*)

Zona Lahan	Indeks Kelayakan Ibukota Negara
Berau 1	1,702
Berau 2	-0,361
Kutai Barat	0,051
Kutai Kartanegara 1	-0,359
Kutai Kartanegara 2	-1,735
Kutai Timur 1	-1,519
Kutai Timur 2	-1,381
Paser	3,601



Gambar 6.
 Zonasi Lahan Potensial Pembangunan Ibukota Negara
 di Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 10.
 Indeks Kelayakan Ibukota Negara
 berdasarkan Zona Lahan (Skenario 2)

Zona Lahan	Indeks Kelayakan Ibukota Negara
Berau 1	1,461
Berau 2	-0,646
Zona Agregat	0,386
Kutai Timur	-1,773
Kutai Kartanegara	-1,453
Paser	2,025

Pada kedua tabel tersebut dapat dilihat besaran nilai indeks kelayakan ibukota negara

dari setiap zona lahan. Zona Paser adalah zona lahan yang memiliki nilai indeks tertinggi untuk perhitungan indeks komposit pada kedua skenario komparasi. Hasil tersebut menunjukkan keunggulan potensial mutlak Zona Paser sebagai unit lahan yang paling layak menjadi lokasi pembangunan pusat pemerintahan nasional atau ibukota negara. Pada skenario satu, Zona Paser unggul secara signifikan di atas zona-zona atau unit lahan lain dengan selisih nilai indeks yang sangat jauh. Hanya terdapat tiga unit lahan yang memiliki nilai indeks positif (di atas nol), yakni Zona Berau 1, Zona Kutai Barat, dan Zona Paser. Zona Paser dengan indeks kelayakan ibukota negara '3,601' berada jauh di atas Zona

Berau 1 sebagai unit lahan dengan nilai indeks tertinggi kedua yakni '1,702'. Zona dengan nilai indeks kelayakan ibukota negara terendah adalah Zona Kutai Kartanegara 2 yang secara fisiografis memiliki permasalahan terkait karakteristik bentuk lahan dengan nilai indeks '-1,735'.

Pada Skenario dua, terdapat kesamaan kesimpulan tetapi dengan proporsi dan komposisi serta hierarki nilai indeks komposit unit lahan yang sedikit berbeda. Zona Paser tetap menjadi unit lahan dengan nilai indeks tertinggi (2,025) tetapi dengan selisih besaran yang tidak terlalu signifikan dengan Zona Berau 1 yang kembali menempati posisi kedua dengan nilai indeks kelayakan ibukota negara '1,461'. Pada skenario komparasi dua, Zona Kutai Timur adalah unit lahan dengan nilai indeks kelayakan ibukota negara terendah yakni '-1,773'. Kedua skenario perhitungan indeks komposit tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Zona Paser (dengan konsentrasi lahan sesuai untuk pembangunan ibukota negara yang sebagian besar berada di Kabupaten Paser) merupakan zona atau unit lahan potensial yang paling layak menjadi lokasi pembangunan komponen pusat pemerintahan nasional atau ibukota negara Indonesia yang baru.

SIMPULAN

Berdasarkan indikator situasional geosratategis (sentralitas keruangan dan aksesibilitas eksternal) yang diintegrasikan dengan potensi ancaman bencana alam skala makro (gempa bumi, tsunami, dan gunung api), terdapat empat provinsi yang terklasifikasi sebagai provinsi dengan kelayakan tertinggi untuk mengemban peran sebagai ibukota negara. Provinsi-provinsi yang dimaksud, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur.

Dari keempat provinsi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi yang dinilai paling potensial menjadi ibukota negara berdasarkan tiga indikator dengan karakteristik penunjang antara lain; (1) Potensi Infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur aktual dan

infrastruktur potensial, (2) Potensi Integrasi Ekonomi Nasional, serta (3) Potensi Sosial yang terdiri dari tiga aspek yakni sumberdaya manusia, stabilitas politik, dan potensi konflik.

Berdasarkan timbangan yang didasarkan pada tiga indikator, antara lain: (1) Ketersediaan Lahan merupakan luasan wilayah hasil eliminasi dari lahan-lahan yang terkategori memiliki kendala seperti lahan rawan bencana alam, lahan dengan kemiringan lereng yang tidak ideal, serta lahan yang secara fungsional tidak diperuntukkan untuk aktivitas pembangunan, (2) Curah Hujan, yang merupakan indikator ketersediaan air meteorologis, serta (3) Kerapatan Titik Panas (*Hotspot*), yang merupakan indikator kebakaran (representasi spasial kerawanan bencana alam non poligonal), wilayah yang dinilai memiliki peluang pengembangan terbesar menjadi lokasi pembangunan komponen pusat pemerintahan nasional atau ibukota negara adalah Kabupaten Paser.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. M.F.U. 2010. Evaluasi Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Arkanuddin. 2005. Menelusuri Akar Konflik Antar Etnik di Kalimantan Barat. *Jurnal Mediator* 5 (2):186.
- Aurumbita, Yuke Nori. 2015. Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Baiquni, M. 2004. *Membangun Pusat-pusat di Pinggiran Otonomi di Negara Kepulauan*, Yogyakarta: IdeaAs & PKPEK. Yogyakarta.
- Claval, P. 2000. "The European System of Capital Cities. *GeoJournal* 51 (1/2): 73 - 81.
- Dijkink, G. 2000. Eoupean Capital Cities as Political Frontiers. *GeoJournal* 51 (1/2):65 -71.

ANUGERAH A. SAHAMONY, LUTHFI MUTA'ALI, DAN ESTUNING TYAS WULAN MEI ❖
TINJAUAN GEOGRAFIS WILAYAH POTENSIAL IBUKOTA NEGARA INDONESIA

- Golany, G. 1976. *New-Town Planning: Principles and Practice*, New York: A Wiley-Interscience Publication.
- Kumar, Anjani. 2015. *The Hindu Business Line: Relocating India's Capital*, Chatham: Newstex.
- Muta'ali, Luthfi. 2015. *Teknik Analisis Regional*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Spate, OHK. 1942. Factors in The Development of Capital Cities. *Geographical Review* 32 (4): 662 – 631.